

Agenda Global Menuju Praktik Lokal *Blue Economy*: Analisis *Global-Local Nexus* dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Kabupaten Bima

Dewi Nur Anjani¹, Nursa Fitri²

^{1,2} Program Studi Perdagangan Internasional Universitas Mbojo Bima

Abstrak

Konsep *Blue Economy* merupakan agenda global yang menekankan pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Artikel ini menganalisis keselarasan antara prinsip-prinsip global *Blue Economy* dan kebijakan pariwisata daerah Kabupaten Bima melalui pendekatan *global-local nexus*. Penelitian ini menggunakan metode *literature review* dengan menelaah dokumen kebijakan internasional, nasional, serta Peraturan Daerah Pariwisata Kabupaten Bima. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengidentifikasi sejauh mana agenda global *Blue Economy* diadopsi dalam kebijakan pariwisata lokal. Hasil kajian menunjukkan bahwa Perda Pariwisata Kabupaten Bima telah mencerminkan prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan, namun integrasinya masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya menyentuh aspek operasional *Blue Economy*. Studi ini menegaskan pentingnya penguatan kebijakan lokal agar agenda global dapat diterjemahkan secara efektif di tingkat daerah.

Kata Kunci: *Blue Economy; Global-Local Nexus; Pariwisata Berkelanjutan; Tourism Governance; Kabupaten Bima.*

Abstract

The Blue Economy is a global agenda that emphasizes the sustainable use of marine and coastal resources to support economic development while preserving environmental integrity. This article examines the alignment between global Blue Economy principles and local tourism policy in Bima Regency through a global-local nexus perspective. Using a literature review method, the study analyzes international, national, and local policy documents, particularly the Regional Tourism Regulation of Bima Regency. Qualitative analysis is employed to assess how global Blue Economy agendas are translated into local tourism governance. The findings indicate that sustainability and environmental protection principles are reflected normatively in the regional regulation; however, their integration remains limited at the operational level of Blue Economy implementation. This study highlights the importance of strengthening local policy frameworks to ensure the effective localization of global sustainability agendas.

Keywords: *Blue Economy; Global-Local Nexus; Sustainable Tourism; Tourism Governance; Kabupaten Bima.*

Copyright (c) 2026 **Dewi Nur Anjani¹**

✉ Corresponding author :

Email Address : dewinuranjani@gmail.com

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi paradigma utama dalam agenda pembangunan global selama dua dekade terakhir. Paradigma ini menekankan integrasi antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial

sebagai fondasi pembangunan jangka panjang (United Nations, 2015). Dalam konteks wilayah pesisir dan kelautan, pendekatan pembangunan berkelanjutan menjadi semakin penting mengingat tingginya tekanan terhadap ekosistem laut sekaligus besarnya potensi ekonomi yang dimilikinya (World Bank, 2017; Dahuri, 2014).

Salah satu pendekatan yang berkembang dalam diskursus pembangunan pesisir dan kelautan adalah konsep *Blue Economy*, yang menekankan pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan daya dukung ekosistem (UNEP, 2013; FAO, 2018). Dalam konteks Indonesia, *Blue Economy* dipahami sebagai strategi pembangunan kelautan yang mengintegrasikan efisiensi ekonomi, keberlanjutan ekologis, dan inklusivitas sosial (Dahuri, 2018; Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2021).

Sebagai agenda global, *Blue Economy* terintegrasi secara normatif dalam kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya SDG 14 tentang kehidupan bawah laut, serta memiliki keterkaitan erat dengan SDG 8 dan SDG 12 yang menekankan pertumbuhan ekonomi inklusif dan pola produksi serta konsumsi berkelanjutan (United Nations, 2015). Namun demikian, berbagai kajian menunjukkan bahwa keberhasilan agenda global tersebut tidak hanya ditentukan oleh perumusan kebijakan di tingkat internasional, tetapi sangat bergantung pada bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterjemahkan dan diimplementasikan dalam konteks nasional dan lokal (Meyer et al., 1997; Nugroho, 2017).

Dalam konteks ini, perspektif *global-local nexus* menjadi kerangka analitis yang relevan untuk memahami hubungan dinamis antara agenda global dan praktik lokal. Meyer et al. (1997) menjelaskan bahwa agenda global berfungsi sebagai kerangka normatif yang memengaruhi kebijakan nasional, tetapi implementasinya dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan negara dan daerah. Brenner (2004) menambahkan bahwa kebijakan global mengalami proses *rescaling*, di mana pemerintah daerah memainkan peran penting dalam menafsirkan dan menyesuaikan agenda global sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan kelembagaan lokal. Dalam konteks Indonesia, proses adaptasi kebijakan global juga sangat dipengaruhi oleh karakteristik tata kelola daerah dan kapasitas institusi lokal (Pratikno, 2015).

Salah satu sektor strategis dalam implementasi *Blue Economy* adalah pariwisata berkelanjutan, khususnya pariwisata pesisir dan bahari. Pariwisata berkelanjutan dipandang sebagai instrumen pembangunan yang mampu menciptakan nilai ekonomi sekaligus mendorong pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal (UNWTO, 2018; Ardika, 2015). Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa tanpa tata kelola yang efektif, pengembangan pariwisata berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan, konflik pemanfaatan ruang, serta ketimpangan sosial (Bramwell & Lane, 2011; Hall, 2011; Damanik & Weber, 2006).

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis *Blue Economy*. Pemerintah Indonesia telah mengarusutamakan prinsip ekonomi biru dalam kebijakan kelautan dan perikanan nasional, serta mendorong pengembangan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2021; Sunaryo, 2013). Kebijakan ini menjadi kerangka acuan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata berbasis potensi lokal.

Di tingkat daerah, implementasi pariwisata berkelanjutan menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Berbagai studi menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas kelembagaan, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, serta kesenjangan antara perencanaan dan implementasi kebijakan menjadi permasalahan umum dalam pengelolaan pariwisata daerah (Hall, 2011; Bramwell & Lane, 2011; Pratikno, 2015). Kondisi ini menegaskan pentingnya analisis global-local nexus untuk memahami dinamika penerjemahan agenda global ke dalam praktik lokal.

Kabupaten Bima merupakan salah satu wilayah pesisir di Indonesia yang memiliki potensi signifikan dalam pengembangan pariwisata bahari dan budaya. Keindahan bentang alam pesisir, kekayaan ekosistem laut, serta keberagaman budaya lokal menjadi modal penting dalam mendorong pembangunan pariwisata berkelanjutan. Namun demikian, wilayah ini juga menghadapi berbagai permasalahan, seperti keterbatasan infrastruktur pendukung, tekanan terhadap lingkungan pesisir, serta belum optimalnya tata kelola pariwisata. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara agenda global *Blue Economy* dan praktik lokal pengelolaan pariwisata.

Sejauh ini, sebagian besar penelitian tentang *Blue Economy* dan pariwisata berkelanjutan masih berfokus pada tataran normatif atau kebijakan nasional dan global (UNEP, 2013; World Bank, 2017; Dahuri, 2018). Kajian yang secara khusus menganalisis *global-local nexus* dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di tingkat daerah, khususnya pada wilayah pesisir seperti Kabupaten Bima, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji bagaimana agenda global *Blue Economy* diterjemahkan dan diimplementasikan dalam konteks lokal melalui pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Bima.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *literature review* untuk menganalisis hubungan *global-local nexus* dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan sebagai praktik lokal *Blue Economy* di Kabupaten Bima. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam bagaimana agenda global *Blue Economy* diterjemahkan dan diadaptasi ke dalam kebijakan serta strategi pengelolaan pariwisata di tingkat lokal, bukan untuk mengukur hubungan kausal atau melakukan pengujian hipotesis.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur dan dokumen kebijakan yang relevan. Literatur akademik meliputi artikel jurnal ilmiah, buku referensi, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas *Blue Economy*, pariwisata berkelanjutan, serta konsep *global-local nexus*. Selain itu, penelitian ini juga menelaah dokumen kebijakan yang bersifat internasional, nasional, dan daerah, seperti kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs), kebijakan nasional di bidang pariwisata dan kelautan, serta peraturan daerah yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Bima.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, menyeleksi, dan mengklasifikasikan sumber-sumber tertulis yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumen dan literatur dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan isu *Blue Economy*, pengembangan pariwisata berkelanjutan, serta pengelolaan pariwisata di wilayah pesisir. Proses ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kerangka kebijakan dan pendekatan pengelolaan pariwisata yang diterapkan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu menyaring informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Tahap kedua adalah penyajian data, dengan menyusun hasil telaah literatur dan dokumen kebijakan secara sistematis untuk menggambarkan hubungan antara agenda global *Blue Economy* dan praktik pengelolaan pariwisata di tingkat lokal (Qomaruddin dan Sa'diyah, 2024). Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu menginterpretasikan temuan untuk memahami pola penerjemahan agenda global ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Bima.

Melalui tahapan tersebut, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika *global-local nexus* dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi proses adaptasi agenda global *Blue Economy* dalam konteks lokal. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi analitis bagi penguatan perencanaan dan pengelolaan pariwisata berkelanjutan di tingkat daerah.

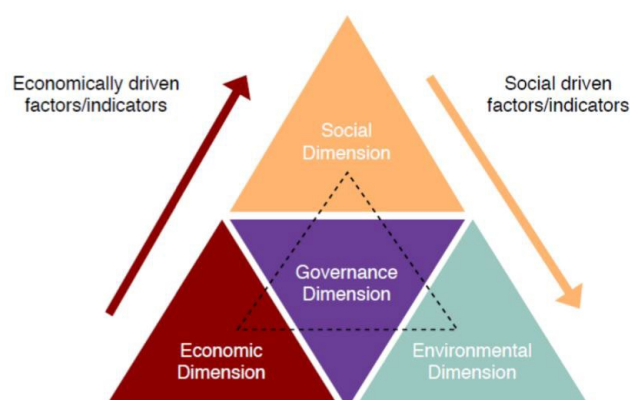
HASIL DAN PEMBAHASAN

Blue economy menurut *United Nation* (UN) adalah pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan mata pencaharian dan terciptanya lapangan kerja, sekaligus menjaga kelestarian dan kesehatan ekosistem laut (Agam *et al.*, 2025). Sedangkan pengertian menurut *United Nation Environmental Programme* (UNEP) *blue economy* merupakan pendekatan pembangunan yang menekankan pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk mendukung pembangunan ekonomi, dengan tetap mengutamakan perlindungan, keberlanjutan, dan kesehatan ekosistem laut (Chandra *et al.*, 2021).

Sedangkan *Global-local nexus* menjelaskan kompleksitas hubungan *global-local* dalam konteks pembangunan pariwisata dan ekonomi, yang menekankan bahwa proses global memengaruhi hasil di tingkat lokal sekaligus lokal membentuk cara global bekerja di wilayah tertentu (Teguh, 2024).

Dalam kerangka kebijakan yang dikembangkan oleh European Commission, *Sustainability Criteria for the Blue Economy* menetapkan empat indikator utama yang merepresentasikan prinsip keberlanjutan sebagai fondasi pengembangan *blue economy*, yang relevan untuk menilai praktik ekonomi kelautan pada berbagai konteks lokal. Keempat indikator tersebut adalah sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola.

Untuk memahami kompleksitas penerapan *Blue Economy* dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan, diperlukan kerangka analisis yang mampu menangkap keterkaitan antara dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola. Gambar berikut menyajikan kerangka multidimensional *Blue Economy* yang menekankan pentingnya keseimbangan dan interaksi antar dimensi tersebut dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.



Gambar 1. Balance in Sustainability Dimensions for the Blue Economy Sectors
(*Sustainability criteria for the blue economy guidelines*, European Commission)

Gambar tersebut menunjukkan bahwa *Blue Economy* merupakan kerangka multidimensional yang mengaitkan dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola dalam perumusan kebijakan. Dalam penelitian ini, kerangka tersebut digunakan untuk menganalisis isi Perda Pariwisata Kabupaten Bima dan kesesuaiannya dengan agenda global *Blue Economy*, khususnya dalam proses adaptasi dan internalisasi prinsip-prinsip global ke dalam kebijakan lokal. Hasil analisis menunjukkan bahwa prinsip keberlanjutan telah tercermin secara normatif, namun integrasi agenda global *Blue Economy* masih bersifat implisit dan belum dirumuskan secara sistematis (Rijal, 2023).

Studi literatur dan dokumen kebijakan menunjukkan bahwa konsep *Blue Economy* telah terinternalisasi sebagai bagian dari agenda pembangunan global yang kemudian diadopsi secara normatif dalam kebijakan pariwisata di Indonesia. Prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial sebagaimana dirumuskan dalam kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs) menjadi landasan utama dalam perumusan kebijakan sektor pariwisata, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dalam konteks ini, *Blue Economy* diposisikan sebagai pendekatan strategis yang mendorong pemanfaatan sumber daya pesisir dan bahari secara produktif tanpa mengabaikan keberlanjutan ekologis dan sosial (Revika dan Eliyanti, 2025).

Agenda Global Blue Economy	Prinsip Utama	Kebijakan Lokal (Perda Pariwisata Kab. Bima)	Bentuk Global-Local Nexus
<i>Blue Economy</i> (UNEP/EC)	Keberlanjutan Lingkungan	Pasal tentang pelestarian kawasan wisata	Adaptasi Normatif
Pariwisata berkelanjutan	Kesejahteraan Masyarakat	Pasal tentang pemberdayaan Masyarakat	Translasi kebijakan
SDGs (SDG 8 & 14)	Pertumbuhan Inklusif	Visi/misi pariwisata daerah	Harmonisasi tujuan

Hasil analisis terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bima tentang Pariwisata menunjukkan bahwa agenda global *blue economy* telah tercermin secara normatif dan implisit dalam kebijakan pengembangan pariwisata daerah. Meskipun istilah *blue economy* tidak disebutkan secara eksplisit dalam regulasi tersebut, namun terdapat prinsip dasar yang selaras dengan agenda global *blue economy*, khususnya dalam orientasi pariwisata berkelanjutan, pelestarian lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Kebijakan pariwisata daerah menempatkan keberlanjutan sebagai salah satu prinsip utama dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata. Prinsip ini tercermin dalam berbagai ketentuan yang menekankan perlindungan sumber daya alam, pengelolaan kawasan wisata secara berkelanjutan, serta pemanfaatan potensi pariwisata yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Pendekatan tersebut sejalan dengan pandangan Kustiwa dan Mokodompit (2025) yang menegaskan bahwa orientasi pembangunan pariwisata berkelanjutan selaras dengan agenda global *blue economy*, khususnya dalam pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan sebagai prasyarat pembangunan ekonomi jangka panjang.

Selain itu, Perda Pariwisata Kabupaten Bima juga mengakomodasi peran masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata. Ketentuan mengenai pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan, serta keterlibatan komunitas lokal dalam aktivitas pariwisata menunjukkan adanya kesesuaian dengan dimensi sosial *blue economy*, khususnya dalam aspek peningkatan mata pencaharian (*livelihoods*) masyarakat pesisir dan sekitar kawasan wisata.

Dengan demikian, secara konseptual, kebijakan pariwisata Kabupaten Bima telah menunjukkan keselarasan awal dengan agenda global *blue economy*, meskipun masih berada pada tataran normatif dan belum dirumuskan secara sistematis dalam satu kerangka kebijakan yang utuh.

Kerangka analisis *global-local nexus* dalam penelitian ini digunakan untuk menelusuri keterkaitan antara agenda global *Blue Economy* dan kebijakan pariwisata lokal di Kabupaten Bima. Agenda global *Blue Economy* yang dirumuskan oleh UNEP dan *European Commission* dianalisis melalui prinsip keberlanjutan lingkungan dan dikaitkan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Pariwisata Kabupaten Bima yang mengatur pelestarian kawasan wisata, yang merepresentasikan bentuk adaptasi normatif dari nilai-nilai global.

Selanjutnya, konsep pariwisata berkelanjutan dianalisis melalui prinsip kesejahteraan masyarakat dan dihubungkan dengan pasal-pasal tentang pemberdayaan masyarakat lokal, yang menunjukkan adanya proses translasi kebijakan dari tingkat global ke lokal. Selain itu, tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 8 dan SDG 14, dianalisis melalui prinsip pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan dikaitkan dengan visi dan misi pengembangan pariwisata daerah, yang mencerminkan harmonisasi tujuan antara agenda pembangunan global dan kebijakan pariwisata lokal (Priyono, 2024).

Dalam perspektif *global-local nexus*, kebijakan pariwisata Kabupaten Bima dapat dipahami sebagai bentuk penerjemahan agenda global pembangunan berkelanjutan ke dalam konteks lokal. Agenda global *blue economy* yang berkembang melalui organisasi internasional dan kebijakan global tidak diadopsi secara langsung, melainkan disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan kelembagaan daerah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa relasi *global-local nexus* dalam kebijakan pariwisata Kabupaten Bima bersifat adaptif dan selektif. Prinsip-prinsip global seperti keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat diterjemahkan ke dalam norma dan tujuan kebijakan daerah tanpa mengadopsi secara eksplisit terminologi maupun indikator global *blue economy*. Hal ini menunjukkan bahwa agenda global berfungsi sebagai kerangka normatif umum, sementara implementasinya disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas lokal.

Pendekatan tersebut mencerminkan karakteristik *global-local nexus* yang menekankan bahwa hubungan global dan lokal bukanlah hubungan satu arah,

melainkan proses interaksi yang dinamis. Dalam konteks Kabupaten Bima, kebijakan pariwisata berperan sebagai ruang mediasi antara tuntutan agenda global dan realitas lokal, di mana pemerintah daerah mengadopsi nilai-nilai global yang dianggap relevan tanpa sepenuhnya mereplikasi kerangka kebijakan global.

Namun demikian, absennya kerangka *blue economy* yang eksplisit dalam Perda Pariwisata menunjukkan bahwa relasi *global-local nexus* masih bersifat normatif dan belum terinstitusionalisasi secara kuat dalam kebijakan daerah. Hal ini berpotensi membatasi efektivitas penerjemahan agenda global *blue economy* ke dalam praktik pengelolaan pariwisata yang lebih terukur dan berkelanjutan.

Meskipun terdapat kesesuaian normatif, hasil analisis juga menunjukkan bahwa kebijakan pariwisata Kabupaten Bima belum sepenuhnya sejalan dengan agenda global *blue economy* dalam beberapa aspek penting. Pertama, Perda Pariwisata belum secara eksplisit mengintegrasikan konsep *blue economy* sebagai kerangka pembangunan pariwisata daerah. Ketidakhadiran terminologi dan kerangka konseptual tersebut menunjukkan bahwa adopsi agenda global masih bersifat implisit.

Kedua, kebijakan pariwisata daerah belum dilengkapi dengan indikator keberlanjutan yang terukur sebagaimana direkomendasikan dalam pedoman global *blue economy*. Ketentuan yang ada masih bersifat umum dan normatif, sehingga belum memberikan panduan operasional yang jelas dalam menilai keberhasilan pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis kelautan dan pesisir.

Ketiga, fokus kebijakan pariwisata masih cenderung menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama, sementara aspek daya dukung ekosistem laut dan pesisir belum dirumuskan secara teknis dan terintegrasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip *blue economy* belum sepenuhnya dijadikan sebagai landasan utama dalam perumusan kebijakan pariwisata daerah.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pariwisata Kabupaten Bima memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut menuju praktik *blue economy* yang lebih terintegrasi. Keselarasan normatif yang telah ada dapat menjadi dasar bagi penguatan kebijakan melalui pengintegrasian kerangka *blue economy* secara eksplisit, termasuk penetapan indikator keberlanjutan dan mekanisme evaluasi kebijakan.

Dalam konteks *global-local nexus*, penguatan kebijakan pariwisata daerah tidak harus dilakukan melalui adopsi penuh agenda global, melainkan melalui penyesuaian yang kontekstual dan berbasis kebutuhan lokal. Dengan demikian, kebijakan pariwisata Kabupaten Bima dapat berperan sebagai instrumen strategis dalam menjembatani agenda global *blue economy* dengan praktik pembangunan pariwisata berkelanjutan di tingkat lokal, yakni di Kabupaten Bima.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara agenda global *Blue Economy* dan kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bima dalam kerangka *global-local nexus*. Berdasarkan analisis dokumen terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bima tentang Pariwisata dan kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pariwisata daerah telah menunjukkan keselarasan normatif secara parsial. Dimana agenda global *Blue Economy* tercermin dalam orientasi pariwisata berkelanjutan, upaya pelestarian lingkungan, serta penekanan pada pemberdayaan masyarakat lokal. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan nilai dasar *Blue Economy* yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial,

dan perlindungan ekosistem laut dan pesisir. Namun demikian, integrasi agenda *Blue Economy* dalam kebijakan pariwisata Kabupaten Bima belum dilakukan secara eksplisit dan sistematis, yang ditandai oleh ketiadaan terminologi *Blue Economy*, indikator keberlanjutan yang terukur, serta mekanisme evaluasi kebijakan. Dalam perspektif *global-local nexus*, kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan antara agenda global dan praktik kebijakan lokal masih berada pada tahap adaptasi awal dan belum ditransformasikan dalam bentuk kelembagaan yang kokoh, sehingga diperlukan penguatan kerangka kebijakan, pengembangan indikator keberlanjutan, serta pendekatan yang lebih kontekstual agar kebijakan pariwisata daerah mampu berfungsi secara optimal dalam mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis kelautan dan pesisir.

Referensi:

- Agam, B., Sahari, S., Fajri, I., Yunita, N. F., Lahay, A. F., Afdal, M., ... & Udaya, L. O. M. R. A. (2025). *Inovasi blue economy*. Kamiya Jaya Aquatic.
- Chandra, Y. A., Rustam, I., & Safitri, P. (2021). Implementasi Kebijakan Berbasis Blue Economy Dalam Kerangka Kerja Sama Pemerintah Indonesia Dengan Food And Agriculture Organization (Fao): Studi Mengenai Unit Pengolahan Ikan (UPI) Di Kabupaten Lombok Utara. *Indonesian Journal of Global Discourse*, 3(1), 1-19.
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77-84.
- European Commission. (2021, March). *Sustainability criteria for the blue economy guidelines*. European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d4330267-a3db-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-en>
- Pemerintah Kabupaten Bima. (2023). *Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2023–2038* (Perda No. 1 Tahun 2023). Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/305750/perda-kab-bima-no-1-tahun-2023>
- Teguh, F. (2024). *Tata Kelola Destinasi: Membangun Ekosistem Pariwisata*. UGM PRESS.
- Priyono, V. R. P. (2024). *Implementasi Blue Economy untuk mewujudkan Sustainable Development Goals Ke-14 di Indonesia dalam Perspektif Hukum Lingkungan Internasional* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Rijal, S. (2023). *BUKU-KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WISATA BAHARI BERBASIS BLUE ECONOMY DI PROVINSI SULAWESI SELATAN*.
- Kustiwa, R. I., & Mokodompit, E. (2025). PENGEMBANGAN PARAWISATA BAHARI BERBASIS BLUE ECONOMY. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 2(2), 1347-1352.